

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tentang pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik berupa barang, jasa atau pelayanan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu penyelenggaraan pelayanan publik sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini pemerintah banyak mengeluarkan program melalui organisasi-organisasi dibawahnya sebagai pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan masyarakat.

Desa ialah satuan unit terkecil yang sangat dekat dengan masyarakat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah oleh karena itu dapat dimanfaatkan untuk oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Setiap wilayah tentunya memiliki potensi alam yang berbeda, dari potensi tersebut dapat meningkatkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan masyarakat

Desa merupakan suatu bentuk dari kemandirian di suatu daerah yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan daerah untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat. Potensi desa tidak hanya dari penduduk yang banyak, melainkan dari kekayaan alam yang melimpah. Apabila potensi tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi akan mudah tercapai.

Perkembangan ekonomi di desa sering dianggap lama atau lambat apabila dibandingkan dengan di perkotaan. Oleh karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat melalui dua pendekatan yaitu (1) Keinginan masyarakat untuk perubahan atau langkah-langkah pencegahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, dan (2) Ketersediaan *politic will* dan dapat melaksanakan rencana yang sudah dirancang..

Pengembangan ekonomi sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan berbagai macam program. Tetapi belum juga memperlihatkan hasil yang maksimal, kegagalan tersebut disebabkan oleh ikut campur pemerintah yang terlalu intens, yang mengakibatkan hambatan inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam menggerakkan roda perekonomiannya.

Mengambil pelajaran dari pengalaman yang tidak berhasil pada masa sebelumnya, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) instansi yang bertugas untuk pemberdayaan masyarakat dan desa terkait ekonomi pedesaan dan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan. Salah satu program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sebagai organisasi penguatan ekonomi di desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha

Milik Desa, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yaitu usaha yang dikelola oleh desa melalui investasi yang berasal dari sumber daya desa untuk mengelola asset, layanan, bisnis dan lain-lain dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Peranan BUMDES dalam syarat pelaksanaannya secara implisit yaitu sebagai bisnis sosial dan ekonomi. Peranan sosial dapat dilihat dari keberadaan BUMDES sendiri untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan solidaritas dengan melalui kegiatan BUMDES yang dilaksanakan. Sedangkan peran secara ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui program BUMDES yang dijalankan. Program usaha yang dikelola oleh BUMDES telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yaitu meliputi pemanfaatan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa, perdagangan, hasil pertanian dan peternakan untuk memanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan rakyat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung merupakan salah satu pelaksana program BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2010 tentang pedoman BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Pada saat ini kondisi BUMDES di kabupaten bandung sudah memiliki 130 BUMDES, namun hanya 10% yang sudah berkembang sisanya masih dianggap belum berkembang, hal ini menunjukkan bahwa tidak semua desa mampu menjalan program BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dengan baik.

Salah satunya BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang ada berjalan di desa cibiru wetan. Desa Cibiru Wetan merupakan desa yang berada di kecamatan cileunyi yang sudah menjalankan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Desa Cibiru Wetan termasuk salah satu desa yang memiliki potensi besar di berbagai bidang yaitu bidang kerajinan tangan, perikanan, peternakan dan pengelolaan desa wisata.

BUMDES Desa cibiru wetan diberi nama “BUMDesa Mawa Raharja” adalah program yang berjalan di pemerintahan Desa Cibiru Wetan, BUMDES ini sudah terbentuk sejak tahun 2012 yang dikelola oleh pemerintah desa. BUMDesa Mawa Raharja bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. BUMDesa Mawa Raharja dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di desa Cibiru Wetan. Dalam pengelolaannya, BUMDesa Mawa Raharja melibatkan langsung masyarakat setempat untuk menjalankan program-programnya sebagai tolak ukur keberhasilan BUMDES, apabila tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka BUMDES tersebut akan berjalan dengan baik. Dengan terlaksananya program BUMDES tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal penting, kesejahteraan yang baik dapat menjadi indikator sebagai pembangunan yang baik juga, jika kesejahteraan masyarakat tidak dijadikan sebagai tolak ukur dalam pembangunan peningkatan desa maka menyebabkan kesenjangan atau ketidaksesuaian di desa dan wilayah tersebut. Kesejahteraan yang dimaksud yaitu terpenuhinya sandang dan pangan,

tercukupinya kebutuhan dasar seperti rumah yang layak huni, biaya Pendidikan yang murah dan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas.

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan meningkatkan jumlah PADes, didorong oleh pembentukan BUMDES yang berjalan dengan baik. Namun, pembentukan Bumdes bukanlah satu-satunya langkah yang diperlukan. Pengalaman menunjukkan bahwa pembentukan lembaga yang efektif belum tentu mencapai tujuannya. Kedepannya perlu dilakukan peningkatan kapasitas Bumdes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan awal mengenai pembentukan dan pengelolaan Bumdes. Pemerintah daerah dapat menetapkan standar pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Berikut ada beberapa program BUMDEsa Mawa raharja yang sudah berjalan:

Tabel 1. 1 Omset BUMDES Tahun 2021

No	Unit Usaha	Omset	Persentase thd Omset keseluruhan
1	Tangga Seribu	62.471.125	18%
2	Perdagangan	64.999.050	19%
3	Mitra Bumdes	49.333.358	14%
4	Galeri dan Persewaan	3.993.000	1%
5	Sampah Barokah	12.080.000	4%
6	Sumur Artesis	41.107.000	12%
7	Pinjaman	97.616.000	28%
8	ATK & FC	11.679.200	3%
TOTAL OMSET		343.278.733	100%

Sumber: Laporan Tahunan BUMDesa Mawa Raharja Tahun 2021

Kemudian pada tahun 2022 BUMDEsa Mawa Raharja ini mengalami peningkatan pendapatan atau omset secara keseluruhan. Berikut tabel pendapatan BUMDEsa Mawa Raharja pada tahun 2022:

Tabel 1. 2 Omset BUMDES Tahun 2022

No	Unit Usaha	Target	Realisasi Terhadap Keseluruhan
1.	Tangga Seribu	42.035.000	4%
2.	Air Alkali & Gas	2.508.000	0%
3.	Mitra Bumdes	151.175.785	13%
4.	Galeri dan Persewaan	367.344.000	31%
5.	Pengelolaan Sampah	58.187.000	5%
6.	Sumur Artesis	45.255.500	4%
7.	Pinjaman	53.590.000	5%
8.	Pendapatan Lain	333.399.639	28%
9.	IT Provider	114.955.150	10%
	Total	1.168.450.074	

Sumber: Laporan Tahunan BUMDEsa Mawa Raharja Tahun 2022 (diolah peneliti)

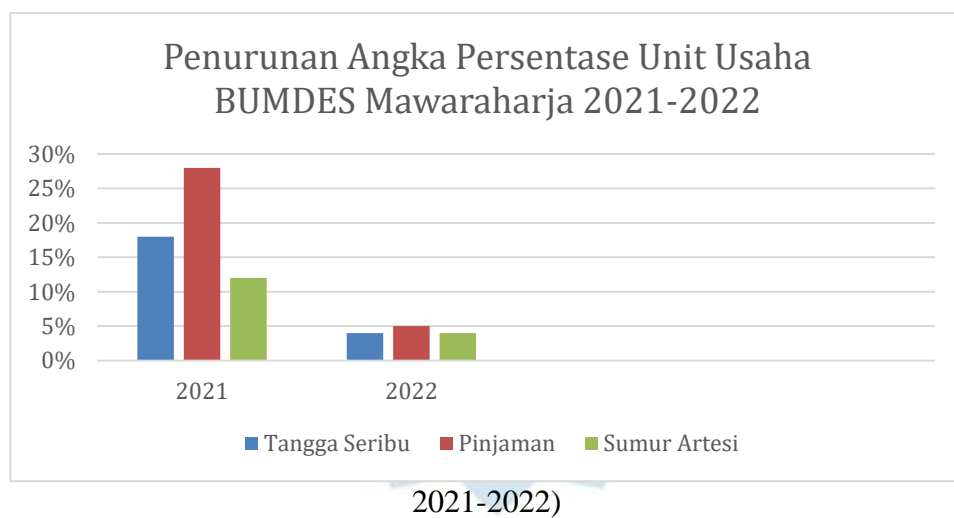
Pada tahun 2022 mengalami peningkatan pendapatan dari beberapa program BUMDES seperti pendapatan lain, informasi teknologi provider, pengelolaan sampah, galeri dan persewaan. Namun pada beberapa program BUMDES terdapat penurunan seperti program seperti tangga seribu, sumur artesis dan pinjaman.

Dapat dilihat pada tabel laporan tahunan BUMDes Mawa Raharja pada tahun 2022 dapat diketahui pencapaian unit usaha BUMDes (Badan Usaha Milik

Desa) Mawa Raharja Desa Cibiru Wetan, dalam pelaksanaannya terdapat realisasi yang tidak stabil pada tahun 2021-2022. Sebagaimana dalam diagram berikut ini terdapat angka penurunan persentase pada beberapa unit usaha BUMDES.

Sumber: Diolah peneliti dari data primer (Omset BUMDES Mawa Raharja tahun

Gambar 1. 1 Grafik penurunan pendapatan program tahun 2021-2022



Berdasarkan dari beberapa data program BUMDES Mawa Raharja di atas seperti pinjaman, sumur artesis dan tangga seribu terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat, pengelolaan yang belum optimal dan banyaknya persaingan.

Namun apabila dilihat pada data diatas, secara keseluruhan dari semua program yang berjalan di BUMDesa Mawa Raharja terjadi peningkatan pendapatan yang cukup besar. Dengan meningkatnya pendapatan tentunya akan berpengaruh terhadap terhadap kesejahteraan masyarakat apabila keuangan dikelola dengan baik dan tranparansi. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait “PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA CIBIRU WETAN KABUPATEN BANDUNG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti akan memaparkan terkait pemahaman penelitian dengan mengidentifikasi masalah, diantaranya:

1. Terjadinya penurunan pendapatan pada pada program pinjaman, sumur artesis dan tangga seribu?
2. Terjadinya peningkatan pendapatan keseluruhan BUMDES Mawa Raharja sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah, maka peneliti dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendapatan keluarga setelah berjalannya program bumdes mawa raharja?
2. Bagaimana komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan setelah berjalanya program bumdes mawa raharja?
3. Bagaimana tingkat Pendidikan keluarga setelah berjalannya program bumdes mawa raharja?
4. Bagaimana tingkat kesehatan keluarga setelah berjalannya program bumdes mawa raharja?

5. Bagaimana kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga setelah berjalannya program bumdes mawa raharja?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan diatas dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat setelah berjalannya program bumdes mawa raharja.
2. Untuk mengetahui komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dan non pangan setelah berjalannya program bumdes mawa raharja.
3. Untuk mengetahui tingkat pendidikan keluarga setelah berjalannya program bumdes mawa raharja
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat kesehatan keluarga setelah berjalannya program bumdes mawa raharja
5. Untuk mengetahui kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga setelah berjalannya program bumdes mawa raharja

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang positif dalam kajian administrasi publik.

- a. Manfaat secara teoretis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan baru untuk para pembaca dan pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma administrasi publik khususnya dalam Kontribusi

BUMDES terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Cibiru Wetan, dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya apabila memiliki kesamaan minat terhadap penelitian ini.

b. Manfaat secara praktis:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pedoman penulisan dengan terkait materi yang relevan.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan bahan bacaan dan menjadi referensi bahan penelitian untuk mahasiswa lainnya.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan bagi aparat desa dan masyarakat untuk memberikan peningkatan kualitas BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Cibiru Wetan melalui referensi penelitian yang telah dikaji.

1.6 Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan negara yaitu menciptakan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat . BUMDes adalah salah satu program peningkatan perekonomian masyarakat di pedesaan. Dengan dibentuk sebagai Lembaga sosial yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa berdasarkan potensi lokal desa. Semakin tinggi peran BUMDesa maka semakin tinggi juga terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Kerangka pemikiran ialah suatu diagram yang dijadikan sebagai gambaran alur dari tema yang ada dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengukuran kesejahteraan masyarakat menurut (Hadari Nawawi,2005) Meliputi beberapa dimensi . (1) Tingkat pendapatan keluarga, (2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan, (3) Tingkat pendidikan keluarga, (4) Tingkat kesehatan keluarga dan (5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran

